KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pertumbuhan ekoomi kok stagnan 5 persen
Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sudah Banyak Paket Kebijakan

Pertumbuhan Ekonomi Kok Stagnan 5 Persen

ANGGOTA Komisi V DPR Bambang Haryo Sukartono menyayangkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini stagnan di angka 5 persen. Untuk itu, dia meminta pemerintah fokus mengatasi persoalan di dalam negeri dalam rangka mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi nasional yang terus melambat dalam beberapa tahun terakhir.

"Sejak masa pemerintahan 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi belum pernah tembus dari angka 5,2 persen. Pada 2014, ekonomi hanya tumbuh 5,01 persen, bahkan sempat turun menjadi 4,88 persen pada 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 5,17," kata Bambang, di Jakarta, kemarin.

Bambang mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 hanya 5,02 persen, jauh di bawah target 5,3 persen dan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 5,17 persen. Angka pertumbuhan nasional ini sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya macam Malaysia, Kamboja, bahkan Filipina.

"Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, berdasarkan data Bank Dunia dan ADB, mereka mampu tumbuh di atas 6 persen pada 2019, yakni Vietnam 6,97 persen, Kamboja 7 persen, Filipina 6,5 persen, Myanmar 6,6 persen, dan Laos 6,5 persen," kata politisi Gerindra ini.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional ini, sambung Bambang Haryo, menunjukkan pemerintah tidak mampu mengatasi masalah domestik, meskipun sudah memacu pembangunan infrastruktur dan investasi. Ironinya, pemerintah selalu beralasan hal ini sebagai akibat dari kondisi global yang tidak serba menentu.

"Pemerintah menyebut ketidakpastian global memukul ekonomi Indonesia, padahal penyebab terbesarnya adalah masalah di dalam negeri," katanya.

Adapun masalah domestik yang menyebabkan ketidakpastian, menurut politisi Surabaya ini, antara lain inkonsistensi regulasi, upah minimum yang berbeda-beda di setiap daerah, fluktuasi bahan pokok dan energi, pungutan liar, korupsi, serta kerusakan infrastruktur. Sebagai contoh, tutur Bambang, bawang putih yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masih dikuasai oleh spekulan dan mafia sehingga harganya berfluktuasi dan penuh ketidakpastian. Bukan hanya itu, harga gas di Indonesia juga masih tinggi sehingga menyebabkan harga pupuk mahal. Akibatnya, harga komoditas pertanian dan perkebunan sebagai sumber pangan ikutan naik.

Bagi Bambang, ekonomi turun sangat tidak beralasan, sebab pemerintah sudah meluncurkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi, membangun infrastruktur 2-3 kali lipat tiap tahun dari pemerintahan sebelumnya, serta mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp 190 triliun dan Dana Desa Rp 74 triliun per tahun. Bukan hanya itu, stabilitas politik juga terjamin sebab saat ini hampir semua partai politik kini bergabung ke koalisi pemerintah sehingga pemerintah pusat bisa lebih mudah mengendalikan pemerintah daerah. "Kalau pemerintah tidak mampu mengatasi masalah domestik, ya keterlaluan," ujarnya. ■ KAL